

JOHN LOCKE DALAM DEMOKRASI

Daya Negri Wijaya

Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang

Abstrak: Studi ini berfokus pada bagaimana gagasan demokrasi terbentuk; diterima atau ditolak oleh masyarakat; dan pengaruhnya pada masyarakat. Pikiran Locke tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Bagi Locke, hidup dalam episode penting sejarah politik Inggris (Perang Sipil 1648 dan Revolusi Kejayaan 1688) mempengaruhi pemikirannya yang luar biasa mencakup filsafat, pendidikan, masyarakat, dan politik. Bagaimanapun Locke tidak pernah membicarakan demokrasi namun dia menjelaskan beberapa gagasan yang menjadi platform demokrasi meliputi hak asasi manusia, kontrak sosial, masyarakat sipil, dan pembangunan masyarakat demokrasi. Seseorang mengetahui pikiran Locke tentang hak melalui pidato Jefferson dalam deklarasi kemerdekaan Amerika bahwa terdapat hak untuk hidup; bebas, kebahagiaan dalam hidup, namun dia berargumen lebih lanjut bahwa manusia seharusnya memiliki hak-hak dasar meliputi kehidupan, kebebasan, kesehatan, dan perlindungan kepemilikan

Kata-kata kunci: pembangunan karakter bangsa, masyarakat sipil, hak, dan kontrak sosial

Abstract: This study concerns on how Locke's democracy is shaped; is accepted or is refused by society; and influences the society. Locke's thought could not be separated from his life. Living in the important episode (civil war 1648 and glorious revolution 1688) of 17th century English political history determines his extraordinary thought comprising philosophy, education, society, and politics. However, Locke never discusses democracy but he explains some ideas on democratic values for instance human rights, contract social, civil society, and democratic society building. People know Locke's rights originally from Jefferson's speech on American independent declaration such as right to life, right to be freedom, and right to be happiness, nevertheless he goes further he claims human beings should have some natural rights comprising right to life, health, freedom, and property preservation.

Key Words: nation and character building, civil society, rights, and social contract

Dalam kehidupan dewasa ini tentunya istilah demokrasi bukanlah hal yang asing untuk di dengar namun sungguh rumit untuk diperbincangkan. Setidaknya, Budiardjo (2009:105) mengungkapkan bahwa demokrasi bukan hanya memiliki beragam pengertian tetapi juga ketidaktentuan dalam cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide yang biasanya dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Demokrasi sebagai sebuah gagasan tentunya selalu berkembang sesuai dengan pengalaman dan tujuan dari si penggagas. Hal ini sesuai dengan idiom yang jamak di gunakan dalam tradisi barat bahwa *If you*

have one apple as well as your friend had, then you change each other you will get only one apple. However, if you have an idea and you share it with your friend, you will have more ideas. Begitu pula yang kiranya terjadi pada paham demokrasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika Amerika mengumandangkan deklarasi kemerdekaan dimana *spirit* republikanisme menyebar secara cepat dari satu pikiran ke pikiran orang lain baik melalui media pembacaan buku maupun diskusi ke seluruh dunia (Pangle, 1988:278).

Semua negara berupaya untuk mendapatkan kemerdekaannya dari tangan penjajah dan pada akhirnya secara umum banyak yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya terutama setelah perang dunia 2 (Budiardjo, 2009:105). Hal ini dilakukan karena penjajahan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan, kebebasan dan kemanusiaan yang menjadi pondasi dari demokrasi itu sendiri. Meminjam teori memetika yang diteorisasikan oleh Eko Wijayanto (2013), jika gagasan demokrasi dapat dianggap sebagai meme, maka gagasan demokrasi akan bersaing dengan ide-ide pemerintahan lainnya untuk masuk pada pikiran atau mental negarawan dan kemudian ketika hinggap dalam pikiran mereka. Meme (demokrasi) akan terus bereplikasi sesuai dengan karakter budaya: menciptakan, memperbaharui, dan mempertahankan budayanya.

Dalam pandangan filsafat empirisme, tidak ada gagasan manusia yang baru karena pada hakikatnya gagasan tersebut didapat dari akumulasi pengalamannya. John Locke (1689) sebagai peletak dasar teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pengetahuan manusia berasal dari apa yang diketahuinya melalui kelima indera manusia (disebut sebagai gagasan sederhana) kemudian bila pengetahuan tersebut mengalir dan berproses dalam otak manusia maka dapat disebut sebagai gagasan kompleks. Lebih lanjut, Koenjtaraningrat (2006) mengungkapkan bahwa budaya pada hakikatnya memiliki tiga wujud dan salah satunya adalah gagasan kompleks. Gagasan kompleks seorang manusia inilah yang nantinya mendorong orang tersebut untuk melakukan sebuah aktivitas berpola dalam menghasilkan sesuatu yang berbentuk konkret.

Kajian tentang gagasan begitu banyak dilakukan oleh bukan hanya ahli filsafat namun juga banyak yang meneliti hal ini dari bidang keilmuan lainnya tak terkecuali sejarah. Pengkajian sejarah

gagasan bukan hanya memungkinkan para pengamat dan sejarawan dalam merekonstruksi apa yang sebenarnya ada dibalik sebuah peristiwa namun jauh dari hal tersebut sejarah gagasan juga dapat memberikan apa yang dimaksud sebagai kebermaknaan sejarah bagi masa kini yang kiranya juga dapat dimaksudkan sebagai sarana solutif bagi permasalahan kontemporer (Wijaya, 2013). Kartodirdjo (2001:16) mengungkapkan bahwa *“on the whole, they differed quite radically from the narrative histories of the conventional school. The new outlooks combined with the problem-oriented mind find their convergence in the analytical perspective”*. Beliau menjelaskan bahwa pendekatan sejarah naratif yang melukiskan sebuah peristiwa sudah terlalu konvensional dan sudah saatnya dikembangkan bersama pendekatan penyelesaian masalah melalui analisa historis (sejarah naratif).

Hal ini dapat dimaklumi bahwa sebenarnya hakikat sejarah bukanlah masa lalu tetapi sebuah disiplin ilmu yang mengkaji masa lalu sehingga kebermaknanya pada masa kini tentu harus dipelihara. Kini, banyak kerancuan yang dikemukakan berbagai khalayak ramai bahwa sejarah adalah masa lalu, bahkan banyak para pengajar sejarah di tingkat SMP dan SMA serta dosen perguruan tinggi juga menggunakan terminologi ini. Hal ini membuat Purwanto (2013:1) menjelaskan bahwa *“sejarah memang tidak dapat dipisahkan dengan masa lalu, tetapi sejarah bukan masa lalu itu sendiri melainkan naratif tentang masa lalu”*.

Perjalanan demokrasi Indonesia tentu tidak luput dari berbagai permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum, sebagai contoh terdapat permainan politik uang dalam pemilihan umum baik dari tingkat daerah maupun nasional. Ikon pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta merta dipertanyakan oleh khalayak umum. Blum (2013) menjelaskan bahwa negara penganut demokrasi belum

tentu menjamin adanya sebuah sistem yang bebas kepentingan. Dia memberikan sebuah contoh bagaimana pasca 1945 pemerintah AS mencoba untuk menggulingkan pemerintahan di lima puluh negara dan campur tangan pada pemilu di negara-negara tersebut (kemungkinan besar Indonesia masuk dalam negara yang dicampuri tersebut). Ketidakjujuran serta hukum yang seolah-olah mati suri ini kemungkinan besar membawa dampak yang bersifat komperador yakni lebih mementingkan kepentingan diri serta golongannya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat serta yang memprihatinkan adalah perilaku korupsi yang kini menjadi budaya populer yang jauh akan adanya perasaan malu dan bersalah. Seolah-olah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan perekonomian asing. Setidaknya hal ini terlihat dari sikap (kebijakan) pemerintah yang enggan menasionalisasikan beberapa perusahaan asing yang menguasai sektor-sektor yang seharusnya dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Padahal sejatinya para pendiri bangsa menyerukan sosio-demokrasi agar pemerintah dapat menjamin kesejahteraan rakyat (Hariyono, 2013).

Sadar ataupun tidak, kini Indonesia yang disebut sebagai salah satu negara yang akan berkembang mengalami proses industrialisasi dari pabrik-pabrik negara-negara maju. Sebagai contoh, penulis memiliki pengalaman untuk berkunjung ke Old Trafford, stadion kebanggaan klub sepak bola liga premier Inggris, Manchester United. Di sekitar stadion terdapat toko resmi klub yang menjual berbagai atribut termasuk kostum klub (*jersey*), syal, dan berbagai pernik lainnya. Saat mendekati dan mengamati kostum klub tanpa diduga kostum tersebut *made in Indonesia* atau dibuat di Indonesia. Nampaknya telah terjadi industrialisasi global disini dimana untuk menekan biaya produksi suatu barang dan menekan upah pekerja yang murah maka

diputuskan untuk membuat pabrik di negara berkembang yang kiranya dipandang lebih murah dan hasil produksinya didistribusikan dengan harga yang berkali-kali lipat dan disebarakan ke seluruh penjuru dunia. maka, tidak ada yang menyangsikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya namun menjadi sebuah renungan mengapa Indonesia belum memenuhi syarat apabila dianggap sebagai negara maju padahal kita sudah menerapkan demokrasi yang juga diterapkan sebagai credo negara-negara maju?

Ternyata demokrasi ataupun sosio-demokrasi yang diyakini para pendiri bangsa sebagai jalan untuk menyejahterakan rakyat belum begitu sepenuhnya telah dijalankan secara ideal ditengah peta percarturan industrialisasi yang semakin mengglobal. Hal ini kemudian bermuara pada satu permasalahan dalam demokrasi Indonesia yang masih berproses yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan perpolitikan Indonesia. Dapat dianalogikan bahwa jika kita sebagai anggota dari sebuah organisasi, jika organisasi tersebut memperjuangkan hak-hak serta kepentingan anggotanya maka dapat dipastikan anggotanya akan menunjukkan kinerja serta loyalitas yang bagus pada organisasi tersebut. Begitu pula dengan hubungan negara dan warga negaranya, jika negara mampu mengayomi segala hak-hak dasar warganya maka sikap acuh terhadap negara akan sirna serta rasa nasionalisme akan tumbuh. Inilah karakter utama masyarakat Indonesia kini yang cenderung pragmatis dengan adagium “uang memang bukan segalanya tetapi segalanya butuh uang”.

Kiranya perlu adanya rekonstruksi ulang mengenai gagasan demokrasi yang berorientasi pada penguatan perekonomian tersebut atau setidaknya perlu dikaji kembali pemikiran para peletak dasar demokrasi yang mulai disemai dalam pemikiran barat. Salah

satu pemikir yang layak untuk dibahas pola pikirnya tentang demokrasi adalah John Locke. Filsuf asal Inggris ini walaupun tidak secara langsung menjelaskan tentang demokrasi namun Syam (2007) seorang ahli filsafat politik menganggap bahwa dia adalah pendekar demokrasi liberal yang sesungguhnya karena gagasannya tentang pemberdayaan politik masyarakat sipil.

Tulisan ini akan mengulas bagaimana kehidupan dan pemikiran John Locke dalam demokrasi meliputi hak asasi manusia; kontrak sosial dan masyarakat sipil; serta cara membangun masyarakat demokrasi.

Kehidupan John Locke

Sangat sulit tentunya dalam memahami gagasan manusia tanpa mengetahui latar belakang sosial dan budaya dari si penggagas tersebut. Latar belakang tersebut merujuk pada kehidupan seseorang dan kehidupannya sebagai pengalaman memandu manusia untuk berpikir dan bertindak di masa kini dan masa depan. John Locke hidup pada zaman Stuart yang mungkin menjadi masa paling kacau dalam sejarah Inggris. Zaman tersebut menjadi saksi bagaimana telah terjadi revolusi dalam segala aspek bukan hanya bidang politik namun juga ekonomi, agama, dan intelektual. Sebagai seorang anak yang lahir pada tahun 1632 di Somerset, Inggris dan besar dari keluarga Puritan taat, Locke begitu dipengaruhi oleh didikan orang tuanya terutama bapaknya (John Locke Senior).

Begitu sedikit informasi yang didapat mengenai masa kecilnya, namun Bourne (1876:13-15) menjelaskan bahwa Locke dibesarkan dengan sangat baik terutama kesehatannya terjamin dan kedisiplinannya dididik di rumah dengan baik pula. Bapaknya bukan hanya mengajarnya untuk belajar bahasa latin namun juga mengajarkannya berpikir tentang permasalahan besar yang muncul pada saat itu. Ayahnya begitu keras dalam mendidiknya dan mengaturnya dalam

segala hal (Vaughn, 1980:1). Terlihat kemudian Locke dalam karyanya *Some Thoughts Concerning Education* ingin menegaskan bagaimana cara mendidik anak yang baik dan secara langsung mengkritisi pola pengasuhan bapaknya.

Sebagai keluarga puritan tentunya sang ayah tidak melewatkan episode revolusi puritan (perang sipil 1648) yang ingin menegakkan kedaulatan rakyat (parlemen) melalui pemilihan umum dibawah Oliver Cromwell. Kemudian untuk menghargai jasa para pengikutnya termasuk ayah John Locke, maka sang anak diberikan keleluasaan untuk menempuh studi di Westminster School yang saat itu menjadi sekolah paling bagus di Inggris oleh Cromwell. Disana dia belajar Bahasa Latin, Yunani, dan Arab. Walaupun dia memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam menerjemahkan sebuah teks dari dan ke bahasa latin tetapi dia merasa tidak begitu menikmatinya karena sangat ketat sistem pembelajarannya dan penuh dengan tekanan. Namun demikian Locke rupanya perlu berterima kasih pada sekolah tersebut karena keuntungannya dia dapat memilih kemana dia akan melanjutkan studi antara *Christ Church, Oxford* atau *Trinity College, Cambridge*. Dia kemudian memilih Oxford sebagai pelabuhan studi selanjutnya pada musim gugur 1652 dan selama 15 tahun belajar disana (Wijaya, 2013).

Saat dia studi di Oxford, Inggris adalah republik antara tahun 1649 sampai 1660 dan mengalami beberapa episode revolusioner. Raja dan relasi serta keluarganya semuanya dibunuh secara brutal tanpa adanya peraturan yang jelas mengenai hal ini. Monarki beserta kekuasaan gejera Anglican dihapus (Morril, 2010:373). Cromwell adalah seorang pemimpin puritan yang memerintah Inggris sebagai *Lord Protector and head of the state*. Pengaruh liberal dari Cromwell begitu terasa hingga ke sendi pendidikan terutama pergantian kurikulum dari *Grammar School* menuju pada *liberalized curricula*

(Jewell, 1998:36). *Liberalized curricula* yang dimaksud lebih menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan praktis seperti ekonomi, perdagangan, dan lingkungan alam daripada hanya sekedar menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya yang menjadi tolak ukur dari *Grammar School*. Pengaruh ini kemudian menyebar ke seluruh sekolah dan universitas di Inggris, tak terkecuali Oxford dan Cambridge.

John Locke merasakan hal yang sama yakni rasa ketidakpuasan terhadap *Grammar School* dan kegiatan pembelajaran di Oxford. Walaupun demikian dia berhasil mendapatkan gelar *Bachelor of Arts* pada tahun 1656 dan *Master of Arts* tiga tahun setelahnya. Dia kemudian mulai mengabdikan dirinya pada almamaternya sebagai pengajar sekaligus tutor bagi siswa Christ Church dalam filsafat dan etika namun kemudian dia begitu tertarik pada kesehatan manusia. Cranston (1985:40) mengungkapkan bahwa pada saat itu seluruh ilmu pengetahuan terkait pada kesehatan termasuk di Oxford yang sedang mendirikan Fakultas Kedokteran dimana kemudian dia begitu tertarik pada filsafat empirisme. Locke memutuskan untuk mengambil kuliah lain yakni kedokteran pada tahun 1663 walaupun gelarnya baru didapat pada tahun 1675 karena aktivitas politiknya yang padat.

Ketika kekuasaan Cromwell jatuh dan penerusnya kurang cakap dalam menjaga republik maka kemudian kekuasaan monarki datang lagi dengan Charles II sebagai rajanya. Peristiwa ini membuat salah satu pemikir politik yang begitu menganut empirisme sebagai metodologi penelitiannya, Thomas Hobbes, meluncurkan sebuah karya berjudul *Leviathan* yang secara garis besar berisi pemerintahan yang baik adalah monarki. Hal ini tentu saja membuat Locke geram dan menkritisi buku tersebut pada medio 1660. Dia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan membimbing para siswanya serta terus mengintrodusir gagasan

liberalnya pada berbagai kesempatan termasuk ketika dia menjadi langganan undangan kaum aristokrat untuk menyampaikan beberapa pidato (Cranston, 1985:76). Ditengah studi kedokteran dia kemudian menyadari bahwa dia sangat dibutuhkan oleh rakyat sebagai seorang dokter karena saat itu pada pertengahan 1660-6 Inggris dilanda wabah PES dan kebakaran hebat terutama di London.

Aktivitas inilah yang nantinya mempertemukannya dengan Anthony Ashley Cooper, seorang pendiri partai *Whig*. Dia berhasil menyembuhkan penyakit Cooper dan Cooper mengangkatnya sebagai salah satu orang kepercayaannya (Cranston, 1985:103). Tugasnya bukan hanya mengawasi kesehatan Cooper namun juga sebagai *Secretary to the Lords and Proprietors of Carolina* pada 1671 yang berarti dia masuk pada lingkaran perpolitikan Inggris saat itu. Ashley Cooper yang kemudian menjadi *The First Earl of Shaftesbury* dan mendapat kekuasaan sebagai *Lord of Chancellor* memberikan tugas pada Locke sebagai sekretaris pada bagian perdagangan. Namun tak berselang lama sang Shaftesbury kehilangan kekuasaannya begitu pula dengan Locke yang kemudian memutuskan untuk bekerja di Prancis dimana dia bertemu dengan ahli kesehatan, filsuf, dan agamawan. Walaupun pada tahun 1679, Shaftesbury memiliki sedikit kekuasaan dan membuat Locke ingin kembali ke Inggris namun tidak berselang lama setelah tinggal disana dia memutuskan untuk pergi ke Belanda. Hal ini dikarenakan Shaftesbury dianggap sebagai pemberontak yang siap menjadi duri kekuasaan raja.

Selama delapan tahun di Belanda dia mengalami petualangan intelektual yang sangat hebat dan pada puncaknya dia berhasil menerbitkan beberapa karyanya seperti *Essay on Human Understanding*, *Education*, dan *Toleration*. Karya-karyanya begitu terkenal hingga *William dan Mary of Orange* begitu terpukau. Pada nantinya merekalah yang

membawa Locke kembali ke Inggris pada 1688. Sinyal-sinyal revolusi kejayaan begitu terasa ketika kekuasaan monarki berhasil dihancurkan oleh *William of Orange*. Raja Belanda Protestan ini berhasil menguasai Inggris di bawah James II yang menjadi raja Katholik Roma terakhir. Revolusi ini berhasil membawa Inggris pada supremasi parlemen diatas tahta dan menyingkirkan Britania Raya berbasis pada monarki konstitusional dan demokrasi parlementer (Vallance, 2011). Setelah kembali ke Inggris, Locke menghabiskan waktunya sebagai pegawai negeri dan menjawab seluruh permasalahan yang dikirim lewat pos ke rumahnya hingga meninggal pada tahun 1701 di High Laver.

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dalam demokrasi (Budiardjo, 2007:211). Hal ini berdampak pada tugas utama suatu pemerintahan adalah menjaga agar HAM tetap dapat terpenuhi namun disisi lain setiap warga negara harus pula memiliki kewajiban dalam menjaga kepentingan negaranya. HAM pada hakikatnya telah dimiliki setiap manusia sejak lahir atau yang disebut John Locke sebagai *natural rights* yakni *right to life, health, freedom, and property preservation*. Secara umum kita tentu terjebak oleh gagasan Thomas Jefferson tentang tiga hak: *life, freedom, and happiness* yang dipandang terinspirasi dari pikiran Locke dan merupakan hak untuk hidup secara sehat. Jika keempat hak yang dimiliki oleh setiap insan ini dilindungi oleh pemerintah dan setiap warga negara dapat menjalankan kewajiban mereka secara konsekuen maka bukan tidak mungkin akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hak pertama yang harus dimiliki oleh setiap manusia menurut Locke adalah hak untuk hidup. Pada masa saat Locke hidup terdapat hukuman cambuk hingga mati di

depan publik. Hal ini dapat dipahami bahwa sebelum tahun 1775 di Inggris hukuman penjara belum begitu banyak digunakan bagi para penjahat. Sehingga hukuman yang umum digunakan adalah hukuman gantung bagi para pelanggar aturan meliputi perampok jalanan, pencuri daging, pembunuh dan lain-lain (Ignatieff, 1978:16). Sewajarnya apa yang diambil baik nyawa orang ataupun barang yang dicuri tidak dibalas dengan nyawa si pelaku kejahatan. Hal ini tidak mengurangi tingkat kejahatan namun malah menandai tingkat kebiadaban dalam masyarakat.

Kesadaran akan kepemilikan hak untuk hidup inilah yang menurut Locke akan membuat pemerintah untuk mengevaluasi kembali hukuman apa yang pantas dijatuhkan pada para pelanggar. Hakikatnya tujuan dari sebuah hukuman di depan publik bukanlah untuk menghibur masyarakat namun untuk membuat orang yang akan melakukan kejahatan jera dan membuat mereka enggan melakukan tindak kriminal. Ketragisan hukuman gantung atau dibakar hidup-hidup di tengah kota malah menumbuhkan rasa simpati masyarakat dan terus mengkritisi kebijakan tersebut melalui media. Akhirnya kebijakan hukuman pada pelaku kejahatan secara biadab dihapuskan (Deveraux, 2005). Hal ini membuat Locke begitu percaya bahwa hidup adalah kebutuhan dasar bagi manusia.

Kedua, hak untuk dapat hidup secara sehat juga menjadi perhatian dari Locke. Locke dalam karyanya *Some Thoughts Concerning Education* membeberkan bahwa sepintar apapun orang ataupun sekuat sistem pendidikan apabila tidak ditunjang kesehatan orang tersebut maka akan sia-sia. Setidaknya hal tersebut dia lukiskan dalam satu kalimat latin singkat namun penuh dengan makna *men sana en corpore sano*. Kesehatan fisik sangat penting untuk melakukan beberapa kegiatan serta aktivitas mental dapat dilakukan dengan baik jika ditunjang dengan

kesehatan badan. Sebagai seorang ahli kesehatan dia nantinya akan memberikan pedoman bagaimana caranya dalam menjaga kesehatan anak bagi para orang tua. Namun, apa yang ia sarankan hanya berlaku pada keluarga kelas menengah ke atas dan berbeda dengan apa yang ia sarankan pada keluarga miskin. Inilah yang kemudian menjadi kontroversi dalam pikirannya tentang hak untuk sehat.

Jika dalam keluarga menengah atas, dia menyarankan agar para orang tua memperhatikan kesehatan anak pada beberapa hal yang meliputi persiapan dalam menghadapi pergantian musim seperti jangan terlalu sering memakai topi di musim panas ataupun dingin karena secara alamiah kita memiliki rambut yang berguna untuk melindungi kepala kita; pakaian yang sesuai dengan postur dan tubuh si anak; diet yang sehat bagi anak seperti jangan terlalu banyak memberikan anak minuman keras di musim dingin; tidur adalah cara alamiah dalam menjaga kesehatan anak serta pertumbuhannya; dan jangan menggunakan terlalu banyak obat-obatan ketika seorang anak sakit (Wijaya, 2013). Sedangkan pada keluarga miskin yang dalam kesehariannya setiap anak cenderung diberikan sedikit perhatian oleh para orang tuanya, Locke hanya menyarankan pada mereka untuk mengonsumsi beberapa roti sebelum mereka akan belajar bekerja (*Apprenticeship*) serta untuk mengatasi musim dingin, para anak-anak ini disarankan untuk minum air hangat dan pemanas ruangan di ruangan tempat mereka akan bekerja (Locke, 1697). Pada zaman Locke, anak-anak banyak yang diperkerjakan di pabrik tekstil dan pertambangan.

Ketiga, hak untuk hidup secara bebas harus dimiliki oleh setiap insan. Locke secara langsung terpengaruh oleh proses liberalisasi kaum puritan saat Cromwell tampil sebagai penguasa. Dia kemudian begitu mengkritisi kekuasaan monarki yang dianggap sewenang-wenang pada rakyat dan mengekang

kebebasan rakyat sedangkan para aristokrat minim yang memberikan kontribusi pada rakyat. Walaupun demikian, pemikirannya mengenai hak untuk bebas menjadi kontroversi tatkala disatu sisi dia membenci penjajahan serta perbudakan dan menghalalkan pekerja yang bekerja dalam durasi yang sangat panjang beserta dengan keluarganya termasuk anak-anak mereka. Dilema pemikiran Locke kiranya pula terjadi dalam dunia pendidikan baik pola pengasuhan anak kelas menengah keatas dan bawah di rumah atau di pabrik (*workhouse*) maupun di sekolah. Hal ini disebabkan karena dia melihat anak-anak kelas menengah atas, mereka tidak memiliki kewajiban selain belajar dan mengetahui indahny ilmu pengetahuan. Namun, bagi kalangan miskin, Locke melihat keadaan yang memprihatinkan dimana anak-anak ini hanya dibebaskan untuk belajar bekerja dari para pekerja senior.

Terakhir, hak kepemilikan harus dilindungi oleh pemerintah. Abad 17 adalah zaman dimana muncul golongan menengah yang sangat kuat yakni pedagang dan nampaknya sistem pemerintahan beserta segala kebijakannya mendukung aktivitas perdagangan. Dalam keadaan seperti ini aset seperti tanah dan barang-barang perdagangan menjadi vital dalam sistem merkantilisme. Dampaknya apabila kepemilikan ini dicuri ataupun dirusak oleh orang lain maka dipastikan pelanggar tersebut akan dihukum gantung atau dibakar.

Kontrak Sosial dan Masyarakat Sipil

Pada masa Locke hidup, pertentangan antara urusan pemerintahan dan urusan terlihat menjadi kekacauan utama dalam masyarakat. Dia percaya bahwa cara yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengembalikan urusan mereka pada hakikatnya. Di satu sisi, pemerintah berhubungan dengan urusan publik seperti bagaimana mengatur masyarakat atau melindungi masyarakat.

Sedangkan di sisi yang lain urusan gereja merujuk pada urusan batiniah antara seseorang dengan tuhan. Locke mempertimbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri; sehingga dibutuhkan kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat. Dia percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah satu-satunya jalan dalam menuju masyarakat beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990:2).

Baginya tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas rakyat akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Namun, hanya manusia yang bebas (bukan budak) yang bersepakat untuk berpikir dan bertindak dalam satu pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai masyarakat sipil. Pemerintah inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat (Richards dkk, 1981:38). Dia mencoba menjelaskan bagaimana sistem kerja pemerintahan dan legitimasinya sesuai dengan argumen-argumen di zamannya seperti keadaan alamiah, keadaan perang, ataupun mitos kontrak sosial. Dia membayangkan kehidupan manusia tanpa sebuah pemerintahan yang disebut keadaan alamiah dan manusia hanya dibatasi oleh hukum alam. Hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan yang mendorong mereka untuk masuk pada alam peperangan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari permasalahan ini adalah keluar dari keadaan alamiah dan menciptakan masyarakat sipil dibawah satu pemerintahan yang berdaulat dengan kesepakatan bersama seluruh rakyat (Plamenatz, 1992:334).

Sangat membingungkan bagi masyarakat umum jika memahami gagasan

Locke tentang pemerintah khususnya jika berkaitan dengan *commonwealth* dan *dominions* (kedua konsep yang dimaksud oleh Locke ini berbeda dengan apa yang dipahami saat ini. keduanya merujuk pada pemerintahan di pusat dan di koloni). Pada abad ke-17, proses kolonialisme Inggris di Amerika mengalami penyesuaian dan percampuran antara teori konstitusi dan praktik kolonialisme. Locke sendiri juga berpartisipasi dalam proses tersebut sebagai salah satu sekretaris informal dari pemilik tanah di koloni Carolina bidang perdagangan (Hsueh, 2002:427-429). Pengalamannya kemudian dituangkan dalam *the Fundamental Constitutions of Carolina* pada tahun 1669. Essai tersebut menjelaskan bagaimana cara membentuk pemerintahan perwakilan yang mengakomodir rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat koloni dapat dikontrol oleh pemilik tanah yang bermukim di Inggris (Locke, 1669). Para pemilik tanah di Carolina membuat hukum dan struktur sosial yang sesuai sehingga dapat menjamin kehidupan yang layak bagi setiap insan dan mengisi semua posisi eksekutif setelah menandatangani beberapa dokumen.

Pemerintahan baik di pusat ataupun di koloni bertugas untuk melindungi properti rakyat dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum yang telah ditegakkan oleh para pendiri negara. Locke (1691:273) berargumen bahwa *it may employ all that power in making laws for the community from time to time, and executing those laws by officers of their own appointing*. Kesepakatan bukan hanya digunakan untuk merevisi hukum dan memilih para eksekutif tetapi juga untuk mengambil pajak dari rakyat seperti yang diungkapkan Locke (1691:227) dalam *governments cannot be supported without great charge, and it is fit everyone who enjoys his share of the protection, should pay out of his estate his proportion for the maintenance of it. But still*

it must be with his consent, i.e. the consent of the majority, giving it either by themselves, or their representatives chosen by them: for if any one shall claim a power to lay and levy taxes on the people. Gagasannya mengenai pemerintahan kiranya bermuara pada pembagian kekuasaan pemerintahan untuk mencapai semua yang diinginkan dari keadaan alamiah manusia dan menjauhi keadaan perang dalam tiga kekuatan: legislatif, eksekutif, dan federatif (Tully, 1993:11).

Menciptakan Masyarakat Demokrasi

Keluarga cenderung menjadi institusi sosial yang pertama dalam membentuk masyarakat demokrasi atau komunitas demokrasi. Hal tersebut dibentuk melalui pendidikan keluarga dan kehidupan keluarga menjadi basis dari karakter demokrasi yang dibutuhkan setiap warga negara. Terdapat beberapa kekuasaan dalam kehidupan keluarga namun Locke berpendapat bahwa dominasi paternalistik begitu dominan dalam pola pengasuhan anak (Locke, 1691:240). Hegemoni paternalistik dimulai sejak anak mereka lahir serta sang ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dan ketika sang ayah tidak memenuhi kebutuhan si anak maka dia akan kehilangan hak-haknya terhadap anaknya (Locke, 1691:244). Sehingga, mereka tidak lahir dalam keadaan setara walaupun pada hakikatnya mereka terlahir untuk itu. Mengikuti Adam (dipercaya sebagai manusia pertama di muka bumi) yang diciptakan dengan sempurna dengan badan yang kuat dan pemikiran logis mengajarkan pada para keturunannya yang terlahir tanpa pengetahuan dan pemahaman, orang tua juga memiliki beberapa pedoman dan aturan yang bertujuan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak-anaknya mendapatkan cara berpikir yang baik dan kedewasaannya (Locke, 1691:241).

Kedewasaan adalah suatu keadaan dimana seseorang mampu mengerti hukum dan bertindak sesuai dengan aturan tersebut. nilai dan norma menjadi pedomannya: seberapa jauh dia memahami aturan tersebut, sejauh itu kebebasan yang akan dia dapatkan. Ketika ia mendapatkan kebebasan maka kedudukan antara ayah dan anak akan setara dibawah hukum yang sama pula. Hal ini berarti tidak akan ada dominasi (walaupun terkadang masih ada bimbingan) dari ayah terhadap anaknya (Locke, 1691:242). Saat anak tumbuh, kebebasannya akan berkembang pula menjadi kebebasan seorang manusia. dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan telah didasarkan oleh kemampuan berpikirnya yang mampu menginstruksikan sejauh mana dia dapat meraih kebebasannya. Kemampuan berpikir adalah hal yang esensial dalam memandu masyarakat menuju demokrasi. Sehingga, Locke (1691:244) menyarankan bagaimana membentuk pikiran anak dalam *reason can hence advance this care of the parents due to their offspring into an absolute arbitrary dominion of the father, whose power reaches no farther than, by such a discipline as he finds most effectual, to give such strength and health to their bodies, such vigour and rectitude to their minds, as may best fit his children to be most useful to themselves and others: and, if it be necessary to his condition, to make them work, when they are able, for their own subsistence.*

Setelah anak dapat berpikir secara rasional, maka diantara orang tua dan anak akan memiliki tugas yang sama yakni tugas orang tua adalah membesarkan anak dan si anak memiliki tugas menghormati orang tuanya. Hal ini diperlukan untuk saling memahami tugas dan dibuat sebuah kesepakatan secara alamiah diantara mereka. Dalam fase berikutnya mereka siap untuk memasuki dunia masyarakat atau dunia diluar rumah. Mereka akan menyesuaikan diri dengan aturan yang sama dalam satu

komunitas berdasarkan apa yang mereka alami dalam pendidikan keluarga. Aturan-aturan di masyarakat pada hakikatnya berjalan secara alami pada sistem pemerintahan seperti yang mereka alami saat masih kanak-kanak. Jika orang tua mereka mendidik dengan kebebasan dan kesetaraan maka mereka akan berusaha mendapatkan kebebasan dan kesetaraan itu sendiri. Sehingga, ketika mereka memasuki dunia masyarakat; masyarakat demokrasi akan muncul dan mereka secara natural akan membangun pemerintahan yang demokratis.

Penutup

Demokrasi dalam pandangan John Locke bukan hanya sekedar pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau perwakilan dari rakyat yang tugas-tugasnya telah diatur dalam konstitusi yang dibuat oleh pendiri suatu negara namun juga bagaimana sistem pemerintahan tersebut siap untuk melindungi dan mengayomi hak-hak dasar warga negaranya. Apabila pemerintah tidak dapat memenuhi semua hak warga negara dan mereka telah melakukan kewajibannya yakni membayar pajak maka tidak salah jika kemudian rakyat menuntut atau pada fase akhir mereka memutuskan untuk membuat pemerintahannya sendiri. Pada perkembangannya pemerintahan ini secara umum akan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat terutama perekonomian. Pemikiran yang meletakkan pada kebebasan rakyat dalam pemerintahan ini kemudian menjadi spirit atau semangat republikanisme yang menyebar ke seluruh dunia. Tentunya JJ Rousseau dan Thomas Jefferson terinspirasi dari pemikirannya dan di belahan dunia lain bukan tidak mungkin Mahatma Gandhi dan Soekarno juga mengembangkan pemikirannya dengan menyesuaikannya pada keadaan sosial dan budayanya.

Dari Locke, kita dapat memahami bahwa sudah sepantasnya ketika kita berbicara tentang proses demokratisasi di

Indonesia perlu kiranya melihat apa yang telah dirumuskan dalam konstitusi serta dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai pijakan dasar dimana para negarawan ini berpikir dan bertindak serta terdapat kesinambungan dalam membuat kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memenuhi hak alamiah setiap warga negara meliputi hak untuk hidup, sehat, kebebasan, dan properti. Namun, setiap warga negara tentu harus melaksanakan kewajibannya pada negara salah satunya adalah membayar pajak. Dengan kerjasama dua arah ini dirasa masyarakat beradab dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan terlaksana. Terpenting dalam membangun masyarakat demokrasi atau proses demokratisasi setiap warga negara harus menghayati intisari demokrasi dalam jiwanya dan hal ini dapat dimulai dari ranah keluarga, sekolah, serta dikuatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dimana berpikir secara logis dan kedewasaan seseorang adalah harga mutlak bagi setiap warga negara dalam masyarakat demokrasi.

Daftar Rujukan

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka.
- Blum, William. 2013. *Demokrasi: Ekspor Amerika yang Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.
- Bourne, Fox. 1876. *The Life of John Locke*. New York: Harper & Brothers.
- Cranston, Maurice. 1985. *John Locke: A Biography*. Oxford: Oxford University Press.
- Deveraux, Simon. 2005. "The Abolition of the Burning of Women in England Reconsidered". *Crime, History, and Societies*, Vol.9 No.2 (2005): 1-14.
- Hariyono. 2013. *Arsitektur Demokrasi Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hsueh, Vicki. 2002. "Giving Orders: Theory and Practice in the Fundamental

- Constitutions of Carolina". *Journal of the History of Ideas*. Vol.63, No.3 (2002): 425-445.
- Jewell, Helen. 1998. *Education in Early Modern England*. London: Macmillan Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 2001. *Indonesian Historiography*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka.
- Ignatieff, Michael. 1978. *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution 1750-1850*. London: Penguin Books.
- Lessnoff, Michael. 1990. Ed. *Social Contract Theory*. Oxford: Basil Blackwell.
- Locke, John. 1824. *The Works of John Locke in Nine Volumes 12th ed.* (London, 1824), Vol.1, *An Essay concerning Human Understanding Part 1* (1689). Accessed 14 December 2012. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/762on2012-12-15>.
- Locke, John. 1689. *The Works of John Locke in Nine Volumes 12th ed.* (London, 1824), Vol. 2, *An Essay concerning Human Understanding Part 2 and Other Writings* (1689). Accessed 14 December 2012. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/762on2012-12-15>.
- Locke, John. 1691. *The Works of John Locke in Nine Volumes 12th ed.* (London, 1824), Vol. 4, *Economic Writings and Two Treatises of Government* (1691). Accessed 14 December 2012. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/1724on2012-12-15>.
- Locke, John. 1669. *The Works of John Locke in Nine Volumes 12th ed.* (London, 1824), Vol. 9, *Letters and Miscellaneous Works: The Fundamental Constitution of Carolina* (1669). Accessed 14 December 2012. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/1724on2012-12-15>.
- Locke, John. 1697. *An Essay on Poor Law*. Accessed 14 December 2012. Available from <http://pols2900.files.wordpress.com/2011/01/poorlaw.pdf>.
- Morril, John. 2010. "The Stuarts 1603-1688". In *The Oxford History of Britain*, edited by Kenneth Morgan, p.327-398. Oxford: Oxford University Press.
- Pangle, Thomas L. 1988. *The Spirit of Modern Republicanism: The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Plamenatz, John. 1992. *Man and Society: Political and Social Theories from the Middle Ages to Locke*. London: Longman.
- Purwanto, Bambang. *Membangun Kesadaran Teoretis dan Metodologis dalam Historiografi Indonesiasentris*. Disampaikan dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Malang 28 Oktober 2013
- Richards, Judith, Lotte Mulligan, & John Graham. 1981. "Property and People: Political Usages of Locke and Some Contemporaries". *Journal of the History of Ideas*. Vol. XLII, No. 1 (1981): 29-52.
- Syam, Firdaus. 1981. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tully, James. 1981. *A Discourse on Property*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Vaughn, KI. 1980. *John Locke: Economist and Social Scientist*. London: Athlone Press.
- Vallance, Edward. *The Glorious Revolution*. Accessed 24 May 2013. Available at http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution_glorious_revolution_01.shtml
- Wijaya, Daya Negri. 2013. *Teori dan Praksis Sejarah Gagasan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wijaya, Daya Negri. 2013. *The Dynamo of Civilised Society: John Locke on Nation and Character Building*. MA Dissertation at the University of Sunderland.
- Wijaya, Daya Negri. 2013. "John Locke on Character Building". *Atikan: Jurnal Kajian Pendidikan*. Vol. 3 (2) Desember 2013. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNSUR Cianjur
- Wijayanto, Eko. 2013. *Memetics: Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan*. Depok: Kepik.